



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XIII/2025

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Nanda Indira B, Antonius Muhammad Ali

PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024
- Pemohon: Hendriwansyah, Danial Anwar

PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- Pemohon: Adi Erlansyah, Hisbullah Huda

PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024
- Pemohon: Ado Mas Ud, Damris

TERMOHON

KPU Provinsi Lampung
KPU Provinsi Sulawesi Barat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 18.56 – 20.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah
Winda Wijayanti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Ahmad Handoko
2. M. Tomi Samantha

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Cipi Hendrayani
2. Erfandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Putra
2. Arif Suherman

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Ampria Bukhori
2. Dodi Yanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Mona Tiara Putri
2. Satria Prayoga

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Sultan
2. Agus Pidarta

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Akriadi
2. Irwin

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Samsul
2. Abdul Wahab

I. Termohon:

1. Fery Ikhsan
2. Perwira
3. Dewi Eliyasari
4. Enda Permata Sari
5. Indo Upe

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yormel
2. Rozali
3. Wahyudi Kasrul

K. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Muhammad Subhan | (Bawaslu Prov. Sulawesi Barat) |
| 3. Fatihunnajah | (Bawaslu Kab. Pesawaran) |
| 4. Oktiyas Afriza | (Bawaslu Kab. Pesawaran) |
| 5. Inda Fiska Mahendro | (Bawaslu Kab. Tulang Bawang) |
| 6. Desi Triyana | (Bawaslu Kab. Tulang Bawang) |
| 7. Adam Malik | (Bawaslu Kab. Pringsewu) |
| 8. Suproni | (Bawaslu Kab. Pringsewu) |
| 9. Rusdin | (Bawaslu Kab. Mamuju) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 18.56 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 20, 147, 207, 48, PHPU Bupati tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sebelum sidang dimulai, saya ingin mengecek dulu apakah semuanya hadir. Pemohon untuk Perkara 20, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [00:34]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Oke, terima kasih.
Pemohon untuk Perkara 147?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [00:38]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Hadir.
Pemohon untuk Perkara 207?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [00:42]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Pemohon untuk perkara 48?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [00:47]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Oke.
Termohon untuk Perkara 20?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: FERY IKHSAN [00:51]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Termohon untuk Perkara 147?

12. TERMOHON: [00:55]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Termohon untuk perkara 207?

14. TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [00:59]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Termohon untuk Perkara 48?
Pihak Terkait untuk Perkara 20?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:06]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Pihak Terkait untuk Perkara 147?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:10]**

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Pihak Terkait untuk Perkara 207?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMSUL [01:15]**

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Pihak Terkait untuk Perkara 48?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
48/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMPRIA BUKHORI [01:19]**

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Bawaslu untuk Kabupaten Peswaran ... Pesawaran?

24. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [01:26]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Hadir.
Bawaslu untuk Kabupaten Pringsewu?
Bawaslu untuk Kabupaten Mamuju?

26. BAWASLU: RUSDIN [01:34]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Bawaslu untuk Kabupaten Tulang Bawang? Oke. Hadir juga Pak Totok. Terima kasih.

Ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Perlu diingatkan.

Pertama, setiap nomor diberi kesempatan maksimal menyampaikan pokok-pokok permohonan 15 menit. Maksimal. Kalau kurang, alhamdulillah. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang dituliskan dalam permohonan.

Yang ketiga, tidak ada perbaikan. Apa pun jenisnya, tidak ada perbaikan karena sudah diberi waktu untuk melakukan perbaikan.

Yang keempat, kalau ada bukti, silakan diserahkan! Tambahan bukti, silakan diserahkan! Bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, karena akan dapat giliran berikutnya, kalau menyerahkan bukti sebaiknya menjelang persidangan agar bisa diverifikasi. Paham, ya?

Oke, sekarang dimohon untuk atau dipersilakan untuk Pemohon Perkara Nomor 20 Kabupaten Pesawaran. Silakan, poin-poinnya saja!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [02:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Walaikum salam.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [03:05]

Permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, Nomor 1635, tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini, Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 yang diusung oleh Partai PDIP, Gerindra, PAN, NasDem, PKB, PKS, dan beberapa partai non-parlaman.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sebagai Termohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Dianggap dibacakan, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [03:56]

Dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Terus, tenggang waktu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [03:59]

Tenggang waktu kami mohon untuk dianggap dibacakan.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Oke.
Kedudukan hukum?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:03]

Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, kami mohon untuk dianggap dibacakan, akan tetapi poinnya (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Ya. Apa poinnya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:14]

Poinnya bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas dianggap dibacakan.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:48]

Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemohon. Karena menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Urut Nomor 1 tidak seharusnya diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 tersebut. Hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Bahwa terhadap ketentuan syarat calon atau pencalonan kepala daerah sebuah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa keputusannya juga memeriksa dan memutuskan apakah syarat pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati sah atau tidak. Bukan hanya memeriksa selisih suara antar pasangan calon dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan perluasan definisi sengketa hasil penghitungan suara dari yang bersifat matematis semata menjadi sengketa yang terjadi selama proses Pilkada yang dapat mempengaruhi perolehan suara.

Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132 PHP-BUP Tahun 2021 (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Itu dianggap dibacakan saja, ya? (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [06:14]

B ... ya, dianggap dibacakan (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [06:17]

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57 PHPU.D/2008 dianggap dibacakan.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Ya, oke. Sekarang intinya, apa yang tidak memenuhi syarat itu? Silakan disampaikan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [06:28]

Ya. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan suara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk meloloskan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan kewenangannya meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas tidak memiliki ijazah SMU atau sederajat.

Bahwa bila melihat dokumen syarat pencalonan calon Bupati Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sama sekali tidak melampirkan ijazah SMU atau sederajat dengan argumentasi Surat Keterangan Kelulusan Ujian Persamaan SMA yang dikeluarkan oleh Kanwil P dan K Provinsi Lampung Tahun Kelulusan 1995 atas nama Aries Sandi Darma Putra hilang, dibuktikan dengan adanya laporan kehilangan nomor TBL dan seterusnya yang dibuat oleh Edy Nata Menggala. Kejanggalan dalam laporan kehilangan tersebut, yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap ujian persamaan SMU negeri mana, hanya menyebut SMU Negeri 1.

Kemudian, yang membuat laporan kehilangan bukan Aries Sandi Darma Putra melainkan orang lain, padahal berdasarkan ketentuan seharusnya yang membuat laporan kehilangan adalah pemilik barang yang hilang, bukan orang lain, dan melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai barang yang hilang tersebut, Bukti P-06.

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan pengganti ijazah paket atau kesetaraan Nomor 420 dan seterusnya. Atas nama Aries Sandi Darma Putra, surat Keterangan pengganti ijazah ini dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berdasarkan tanda bukti laporan kehilangan, sebagaimana dalam laporan kehilangan Nomor TBL dan seterusnya, yang dibuat oleh Edy Nata Menggala. Surat Tanggung Jawab

Mutlak yang dibuat oleh Aries Sandi Darma Putra sendiri, tanpa bukti kepemilikan ijazah, baik fotokopi maupun nomor ijazah atau keterangan dari lembaga pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwasanya Aries Sandi Darma Putra pernah mengikuti ujian persamaan atau bukti benar yang bersangkutan memiliki surat keterangan lulus. Di dalam surat keterangan pengganti ijazah paket kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, tidak menjelaskan dengan jelas dan terang SMU negeri mana yang menerangkan, hanya menerangkan SMU Negeri 1, tahun pelajaran 1995, Bukti P-07.

Bahwa pada saat diklarifikasi oleh Termohon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memberikan penjelasan atau klarifikasi secara tertulis, sebagaimana dalam Surat Nomor 421 dan seterusnya. Yang menerangkan benar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan pengganti ijazah Nomor 420 dan seterusnya, dengan dasar:

Pertama, adanya tanda bukti laporan kehilangan barang atau surat.

Yang kedua, adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat Aries Sandi Darma Putra sendiri, Bukti P-08.

Di dalam Surat Klarifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang dibuat oleh kepala dinas tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas dan terang, disertai bukti dari instansi pemerintah maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membuktikan Aries Sandi Darma Putra pernah menempuh pendidikan SMU atau sederajat atau membuktikan pernah melakukan ujian kesetaraan, atau membuktikan benar pernah memiliki surat keterangan kelulusan ujian bersama (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [09:56]

Oke, yang itu cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [09:57]

Cukup.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:58]

Apa yang dilakukan? Dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [10:01]

Dilaporkan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:02]

Apa hasilnya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [10:01]

Hasilnya bahwa hal permasalahan dugaan adanya ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Bukti P-10. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Pesawaran berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291 dan seterusnya yang dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalam lapor ... laporan Nomor Register 004, laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi, Bukti P-11.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Oke, lanjut!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [10:42]

Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran tersebut, Termohon tetap tidak melakukan tindakan yang mencari tahu atau melakukan klarifikasi dalam rangka investigasi, ada atau tidaknya ijazah atau surat keterangan lulus, atau melakukan tindakan untuk mencari tahu apakah Calon Bupati Nomor 1 pernah menempuh studi SMU atau sederajat. Karena bila mencermati dokumen klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, sama sekali tidak melakukan penelusuran dalam rangka mencari bukti bahwasanya Calon Bupati Nomor Urut 1 pernah menempuh pendidikan SMU atau sederajat. Bila mencermati dokumen surat yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor Urut 1, menerangkan pernah menempuh pendidikan SMU Negeri 1 Bandar Lampung tahun 1995. Namun ter ... Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi ke SMU Negeri 1 Bandar Lampung tersebut, padahal hal tersebut penting.

Termohon juga dengan tidak berdasar hukum, hanya menyatakan surat pengganti ijazah atau paket yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sah. Padahal, bila melihat jawaban tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada

poin 3, menerangkan sahnya ijazah paket atau ijazah, apabila surat laporan kehilangan polisi benar dan surat tanggung jawab mutlak itu benar, maka surat pengganti ijazah, sah. Seharusnya Termohon me-cross-check apakah isi pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor 1 mengandung kebenaran isinya atau tidak? Salah satunya dalam Surat Pernyataan tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah peserta didik SMA Negeri 1 Kota Bandar Lampung (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Oke, soal pendidikan selesai, ya? Cukup.
Apa lagi poinnya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [12:20]

Sedikit, Yang Mulia, ini berdasarkan keterangan dari SMU Negeri 1 Kota Bandar Lampung (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Ya, nanti kami bisa baca, sudah baca, kok.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [12:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKo [12:28]

Bahwa, yang poin kedua (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [12:30]

Apa lagi? Soal utang?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [12:36]

Poin kedua. Bahwa selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih memiliki kewajiban utang kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2015 dengan kewajiban sebesar Rp457.491.250,00.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [13:00]

Dan baru dibayar Rp70.496.500,00, Bukti P-12.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Oke, apa lagi poinnya yang akan disampaikan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [13:13]

Poinnya, pada Pasal 7 ayat (2) huruf k bahwa calon bupati atau wakil bupati itu tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara.

Dengan fakta hukum demikian, Termohon terkesan tutup mata, tidak melakukan klarifikasi dan cross-check kebenaran syarat pencalonan Pasal 1. Tindakan Termohon demikian mencederai proses demokrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2014 ... 2024.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:44]

Ini hasil pemeriksaan BPK tahun berapa ini?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [13:47]

2015, Yang Mulia.
Sekarang, di portalnya di web juga masih tercantum.

69. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Ini ... ini padahal saat menjabat bupati 2015, tapi hasil pemeriksaannya 2015 juga, benar itu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:02]

Benar, memang (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [14:03]

Ada anda lampirkan ini?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:04]

Kita jadikan hal bukti, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

Bukti berapa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:08]

Bukti P (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

P-12, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:10]

P-12.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Oke, nanti dicek. Lanjut!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:12]

Kemudian, ada bukti tambahan juga, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Oke.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:15]

Audit.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Terus, apa lagi?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:18]

Untuk dalil pokok cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:20]

Langsung ke Petitem.

85. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Silakan.

Jadi, Anda hanya punya 2 dalil pokok, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:25]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Satu, soal keterpenuhan syarat karena ijazah (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:28]

Ijazah.

89. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

Tadi yang hilang.
Yang kedua, masih punya tanggungan utang yang keuangan negara itu?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:30]

Siap, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Silakan!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:38]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebuah yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang.

Kedua, membatalkan keputusan komisi melalui pengobatan pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Haji Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H. dan Suprianto, S.P., M.M.

Tiga, mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H. dan Suprianto, S.P., M.M. sebagai pemenang pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Tahun 2024.

Empat, memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Haji Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S., H. sebagai pasangan Bupati Dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:52]

Cukup, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [14:52]

Cukup.

95. KETUA: SALDI ISRA [14:53]

Ada yang ingin dikomentari, Yang Mulia? Pak Ridwan? Silakan!

96. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:54]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:00]

Saudara Kuasa Pemohon ya, ini kan selain dari dalil-dalil itu kan, Saudara juga mendalilkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, ya, itu kan, itu Saudara sebutkan bagian-bagian yang tadi diuraikan itu, itu adalah terstruktur, sistematis, dan juga massif, gitu. Nah, ini kaitannya dengan ... apa ... pengaruh Saudara mengatakan juga di sini bahwa termasuk keterlibatan dari pihak ASN itu dan penyelenggara pemilu, ini bukti-bukti Saudara-Saudara masukkan ini, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [16:39]

Kami masukkan, Yang Mulia. Ini terkait (...)

99. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:40]

Ada bukti, kan? Karena ini harus Saudara hubungkan ini.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [16:43]

Siap, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:43]

Dengan bukti supaya nanti ketika di ... apa ... tahapan acara pembuktian.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [16:49]

Siap, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:50]

Ya, supaya memudahkan untuk me ... kalau (ucapan tidak terdengar jelas) benar Saudara bisa uraikan di dalam dalil ini, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [17:00]

Terima kasih.
Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:04]

Baik, terima kasih.
Saudara Kuasa Pemohon, termasuk Bawaslu ya, dan KPU terutama, ya. Ini kan yang Saudara persoalkan sebenarnya intinya soal ijazah yang hilang itu di 2018, ada surat kehilangan itu, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:19]

Ya, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:04]

Tapi dia lulus tahun 1995?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:23]

Ya, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:24]

Dan pernah jadi Bupati berapa prede ... periode? Baru periode pertama?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:26]

Satu periode, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:27]

Satu periode yang lalu, 2015?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:18]

Ya, 2015.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:30]

Pakai ijazah apa itu pada waktu itu, sudah tahu?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:32]

Saya tidak tahu, mungkin KPU (...)

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:33]

Tolong nanti dari KPU bisa menjelaskan dalam ket ... apa ... jawabannya komprehensif soal ini, ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:38]

Siap.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:39]

Karena ini kan berarti, bukan baru ini berarti.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:42]

Betul, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:43]

Karena dia lulus menurut Anda 1999 ... 95, kemudian pernah jadi bupati tahun 2015-2020 (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:49]

Bet ... ya.

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:51]

Ya. Sekarang dia mencalonkan kembali.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [17:53]

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:04]

Berarti kan, ada ijazah yang digunakan juga sebagai salah satu syarat di situ. Nah, ini tolong nanti Saudara juga bisa membuktikan, saya lihat di sini Bukti P-7 yang Saudara berikan adalah surat keterangan pengganti ijazah saja di sini.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:04]

Ini ada bukti (...)

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

Ya, ini yang dikeluarkan di 2018?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:08]

Siap, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Ya, artinya pada waktu sebelumnya, itu berarti apakah ada ijazahnya dia pada waktu mencalonkan yang sebelumnya? Itu, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:17]

Siap, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:17]

Kemudian, yang terkait dengan utang yang Anda jelaskan di sini 2000, tahun berapa itu utangnya itu?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:24]

2014 (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]

Tahun 2015? Empat belas, ya (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:26]

Auditnya 2015, Yang Mulia (...)

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:27]

Ya, ini ada bukti yang Saudara ajukan juga di P-12, tetapi tidak menunjukkan di mana letaknya kemudian yang Saudara dalilkan sebagai satu utang dari pemerintah daerah (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:37]

Ya.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:37]

Itu yang belum terbayarkan. Tapi buktinya Saudara menyebutkan ada bukti, laporan dari BPK (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:41]

BPK.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:42]

Nanti tolong Saudara bisa tambahkan itu, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [18:45]

Siap, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:45]

Kalau memang kemudian lanjut, kalau tidak ya, lain soal, ya. Dalam kaitan ini, artinya ini kan utang di tahun 2014. Sebetulnya kalau kita lihat pelaporan BPK kan tidak hanya berhenti ... apa namanya ... kan ada setiap tahun selalu ada laporan (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:02]

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:02]

Berkenaan dengan hal itu. Nah, bagaimana Saudara melihat perkembangannya, ya? Sampai kemudian di 2000, pada saat pencalonan kemarin itu, ya. Itu buktinya ada enggak, itu? Soal itu (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:14]

Ada, Yang Mulia. Sampai sekarang sudah sampai kejaksaan untuk menagihnya, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:18]

Oh ya, ini yang 2014 harus Saudara masukkan masalahnya di ... terkait dengan ... apa namanya ... bukti.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:23]

Ada, di bukti tambahan ini, Yang Mulia. Baru kami serahkan tadi (...)

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]

Ada di bukti tambahan itu?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:26]

Ya, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]

Baik, terima kasih kalau begitu.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Cukup, ya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO[19:31]

Cukup, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Oke, terima kasih.

Sekarang kita lanjut, ke Perkara Nomor 147 Kabupaten Pringsewu. Silakan!

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [16:40]

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, mohon izin, Yang Mulia. Membacakan surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, dimana Prinsipal kami, Pasangan Calon Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda, dan selanjutnya kami anggap sudah dibacakan.

Lalu, kemudian kedudukan hukum Pemohon untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan.

153. KETUA: SALDI ISRA [20:20]

Ya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:21]

Kemudian, tenggang waktu pengajuan Permohon kami anggap sudah dibacakan.

155. KETUA: SALDI ISRA [20:23]

Ini kapan di ... apa ... diumumkan, ditetapkan? Tanggal 2 Desember, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:30]

Ya, betul.

157. KETUA: SALDI ISRA [20:31]

Kapan?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:32]

Yang Mulia, 2 Desember 2024.

159. KETUA: SALDI ISRA [20:33]

Pukul 11.00?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:35]

Betul, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Oke, diajukan kapan?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:39]

Tanggal 2 Desember 2004, namun diumumkan pada media sosial resmi Termohon pada tanggal 7 Desember 2024, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [20:47]

Oke, jadi yang ... yang Saudara pakai itu tanggal diumumkan, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [20:53]

Oke, nanti biar dijelaskan KPU. Lanjut!

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [20:55]

Siap. Kemudian, kedudukan hukum Pemohon (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [20:59]

Anda ajukan kapan permohonan?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [21:03]

Permohonan pada tanggal 9 Desember 2024, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [21:08]

Oke.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [21:10]

Kami lanjutkan, kedudukan hukum Pemohon pada poin A bahwa pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan pada poin B bahwa keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu

Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dengan Bukti P-1, kemudian baru diumumkan pada media sosial Facebook oleh KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 7 Desember 2024 pada pukul 11.00 WIB, dengan Bukti P-6.

Kemudian, pada poin C bahwa keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dengan nomor urut 2 dengan Bukti P-2.

Selanjutnya bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c /huruf d atau pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2016, peserta pemilihan bupati dan wakil Bupati dapat mengajukan permohonan, dengan ketentuan, Yang Mulia, izin menjelaskan, lebih ... kurang dari 250.000 jumlah penduduk dengan 2%, lalu kemudian dianggap sudah dibacakan.

171. KETUA: SALDI ISRA [22:50]

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [22:50]

Dengan poin E bahwa Permohon ... bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dengan jumlah penduduk=437.222 jiwa kemudian dianggap sudah dibacakan.

Lalu kemudian poin F bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dianggap sudah dibacakan.

Poin G bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sebesar=66.649 suara.

Poin H bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain, terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa yang pertama, adanya pelanggaran kampanye menggunakan sarana ibadah di masjid secara masif oleh ketua Tim Kampanye Nomor Urut 3 yang bernama Sujadi Saddat, dimana beliau adalah mantan bupati dua periode Kabupaten Pringsewu, kemudian sebagaimana pasal 57 ayat (1) huruf 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang bahkan sudah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Pringsewu, namun dikatakan dari hasil rapat Pleno Bawaslu Pringsewu, bukan suatu pelanggaran dan tidak bisa ditindaklanjuti.

Bawaslu Pringsewu mengatakan bahwa kegiatan tersebut lebih condong sebagai kegiatan tausiah, tidak mengandung unsur kampanye, padahal dari video dengan durasi selama 56 detik tersebut, tujuan Sujadi Saddat tersebut sebagai tim kampanye adalah dalam rangka meyakinkan pemilih, dengan menyampaikan visi misi dan program Calon Nomor Urut 3, dilampirkan dalam Bukti P-3.

Yang kedua, adanya praktik biro jasa dari Termohon dalam melengkapi data-data sebagai syarat yang akan diisi dalam sistem informasi pencalonan atau silon yang dilakukan oleh semua Pasangan bakal Calon Bupati Pringsewu, mulai dari calon bupati dan wakil bupati, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang seharusnya dilakukan penolakan dari Pihak Termohon, jika syarat-syarat administrasinya tidak lengkap. Malah terbalik, praktik biro jasa dilakukan oleh Pihak Termohon, baik dari admin maupun operator silon Termohon dilampirkan dalam Bukti P-4.

Lanjut lagi bahwa (...)

173. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [25:12]

Dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pada Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP (...)

175. KETUA: SALDI ISRA [25:28]

Itu dianggap dibacakan semua, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [25:29]

Dianggap dibacakan (...)

177. KETUA: SALDI ISRA [25:31]

Ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [25:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Lalu kemudian poin C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok ... pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

179. KETUA: SALDI ISRA [26:08]

Terus (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [26:08]

Kemudian pokok permohonan, dianggap dibacakan.

181. KETUA: SALDI ISRA [26:11]

Ya.
Petitum?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [26:13]

Kemudian, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu, Nomor 1185, tahun 2024, Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, pukul 11.10 WIB, atau pada poin B, Keputusan-Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan tetap menetapkan Pemohon

Calon Nomor Urut 2 adalah Peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

Yang ketiga, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, pada pukul 11.10 WIB, yang benar menurut Pemohon, dianggap dibacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [27:45]

Cukup, ya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [27:46]

Cukup, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Terima kasih. Kita lanjut ke perkara ... ada yang mau diklarifikasi, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Prof Enny? Cukup, ya? Tapi ini satu poin saja, kapan diumumkan di medsosnya KPU?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [28:00]

Tanggal 7 Desember 2024.

187. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

7, ya? Tapi di sini nih pen ... baca apa enggak, Keputusan KPU Pringsewu? Di Diktum 3-nya bunyinya begini, "Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 dan Diktum ke-2 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin, tanggal 2 bulan Desember tahun 2024, pukul 11.10 WIB".

Baca, enggak? Baca, ya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [28:36]

Siap, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [28:37]

Oke, makasih.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [28:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

191. KETUA: SALDI ISRA [28:42]

Walaikum salam wr.wb
Kita lanjut sekarang ke Perkara Nomor 207 Kabupaten Mamuju.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [28:52]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.
Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2004[*sic!*] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, Bukti P-1. Dalam Pokok Per ...
Tenggang Waktu pengajuan kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Ya. Kedudukan Hukum?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:21]

Kedudukan Hukum.

195. KETUA: SALDI ISRA [29:22]

Berapa selisih suaranya ini? Selisihnya 38-an, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:29]

Ya, Yang Mulia (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [29:30]

37.000-an, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:31]

36, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

36.000?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:33]

36.000, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [29:34]

Oke, ini artinya lewat ambang batas, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:38]

Ya, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [29:39]

Nah, ini untuk dikesampingkan buktinya TSM, apa yang TSM-nya di sini?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025:IRWIN [29:43]

Baik, kami langsung masuk ke pokok, Yang Mulia, ya?

205. KETUA: SALDI ISRA [29:47]

Ya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [29:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok permohonan bahwa terkait kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Komisi telah membuat judicial review beberapa putusan terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah dengan

menggunakan pendekatan keadilan substantif. Kami anggap dibacakan untuk seterusnya, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [30:14]

Ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2 025: IRWIN [30:18]

Bahwa calon Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sutinah .. Sitti Sutinah, S.H., M.Si. yang juga sebagai petahana telah melakukan rangkaian yang terstruktur, sistematis, dan masif, untuk mendapatkan dana bantuan bencana gempa tahap 2 ka ... pada Kabupaten Mamuju yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN.

Adapun rangkaian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Calon Bupati Mamuju Nomor 1 melakukan kampanye perdana di wilayah Kabupaten Mamuju vide Bukti P-5 yang dimana dalam orasi kampanye menyampaikan jika dana bantuan gempa akan segera cair.

Adapun isi orasi tersebut kami kutip sebagai berikut.

"Tahap 1 sudah selesai. Tahap 2 oke? Oke, tapi belum masyarakatku di sini pasti berharap untuk segera turun. Tahap 2, Bapak-Ibu, dan insya Allah ada kabar gembira untuk kita semua. Ini belum saya bicara sudah tepuk tangan semua, insya Allah tidak lama lagi Bapak-Ibu para korban bencana tahap 2 akan diminta untuk membuka nomor rekening, jadi jangan lagi kita klaim bahwa itu Ibu Bupati tidak nak urus. Saya cuti kampanye, Bapak-Ibu, minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus, makanya saya bisa kasih kabar gembira untuk kita semua. Ini adalah bentuk harapan kita, ini adalah bentuk komitmen kami, Bapak-Ibu. Tugas seorang Bupati untuk bagaimana merealisasikan apa aspirasi masyarakat."

Vide bukti P-6.

209. KETUA: SALDI ISRA [30:47]

Oke, jadi ini Ibu ... Ibu Bupati terpilih ini petahana, ya?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [30:52]

Petahana, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [30:53]

Kalau wakilnya, petahana juga?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [30:54]

Bukan, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [30:55]

Oke. Lanjut!

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [30:56]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November, bertempat di lantai 3 ruang pola bahwa untuk meyakinkan janji kampanye kepada publik pada tanggal 8 Oktober, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Mamuju yang tak lain adalah saudara sepupu dari Calon Bupati Mamuju Nomor Urut 1 merilis berita di media vide Bukti P-7 yang pada pokoknya mendukung isi orasi Calon Bupati Dr. Hj Sitti Sutinah, M.Si. Adapun judul berita tersebut kami kutip sebagai berikut.

Siap-siap Dana Stimulan Gempa Tahap 2 Akan Segera Cair. Dimana dalam isi berita online tersebut menegaskan bahwa akan membentuk tim validasi untuk melakukan pendataan di masyarakat sebagai penerima dana bantuan bencana gempa Kabupaten Mamuju Tahap 2.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 14 November, bertempat di lantai 3 ruang pola Kabupaten Mamuju, vide Bukti P-8 dan Bukti P-9, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi. Adapun peserta yang hadir adalah sebanyak 153 orang yang siap diturunkan untuk mendukung janji kampanye calon bupati petahana.

Selanjutnya, pada tanggal 19 November, Tim Validasi Dana Bantuan Gempa Tahap 2 yang berjumlah 153 orang melakukan pendataan di 6 kecamatan sebagai bentuk realisasi janji kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1, pada tanggal 7 Oktober 2024.

215. KETUA: SALDI ISRA [33:30]

Iki ... ini satu, ya. Enggak usah dijelaskan semuanya, ini ada kaitannya dengan dana kam ... dana ... apa ... Pemulihan Pasca Gempa Tahap 2, ya.

Apa lagi yang lain?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [33:45]

Izin, kami lanjutkan lagi, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [33:46]

Enggak, itunya sudah cukup. Yang isu lainnya, apa?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [33:48]

Terkait money politics, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [33:52]

Nah, silakan! Money politics poin berapa? Ini validasi-validasi dana kampanye ini sudah cukup, ya, dana ... apa ... dana gempa.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:03]

Ya. Yang Mulia.

Baik. Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam ... dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, tidak profesional, tidak transparansi dalam memproses laporan (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [34:13]

Oke.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:14]

(ucapan tidak terdengar jelas) pemilih Calon Nomor Urut 1 Sutinah Suhardi oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait laporan pelanggaran TSM oleh Calon Bupati Nomor Urut 1, Sitti Sutinah Suhardi dalam proses tahapan dan

pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamuju, Pemohon mendapatkan fakta bahwa Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melanggar asas pelanggaran pemilu, yaitu profesional, terbuka, dan tidak menciptakan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon terkait pelaporan pidana pemilu laporan pelanggaran TSM, padahal perkembangan dunia kepemiluan di Indonesia menurut kerja-kerja profesional dari institusi pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan jajarannya, berbenah diri atas catatan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024, Mahkamah Konstitusi sangat peduli dan berkepentingan dalam situasi ini dalam beberapa Putusan Sengketa Pilpres 2024, menjelaskan soal peran dan tanggung jawab Bawaslu.

223. KETUA: SALDI ISRA [34:17]

Oke. Mana yang tadi yang soal apa itu? Korupsi itu?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:19]

Korupsi?

225. KETUA: SALDI ISRA [34:20]

Apa tadi?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:21]

Money politics, Yang Mulia (...)

227. KETUA: SALDI ISRA [34:21]

Money politics. Mana itu money politicsnya, di poin berapa?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:28]

Sebentar, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2004[*sic!*], ditemukan 2 kecamatan Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju, ditemukan ada dan diamankan beberapa warga yang membagikan amplop berisi uang dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 1.

229. KETUA: SALDI ISRA [34:54]

Itu poin berapa?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [34:55]

34, Yang Mulia. Halaman 22.

231. KETUA: SALDI ISRA [34:58]

Sebentar, kita lihat. Oke, oke. 34, 35, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:07]

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [36:08]

Itu berapa banyak ... apanya ... yang ditemukan? Ditemukan 2 kecamatan di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang membagikan amplop. Itu berapa orang yang diamankan?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:25]

3 orang, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

3 orang. Masing-masing amplopnya berapa?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:32]

Itu ... ada yang Rp100.000,00, ada yang Rp150.000,00, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Bukan, itu jumlah uangnya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:39]

Ya, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Jumlah amplopnya berapa?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:41]

Jumlah keseluruhan, Yang Mulia?

241. KETUA: SALDI ISRA [36:42]

Ya.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:45]

Kalau untuk jumlah keseluruhan, Yang Mulia, pada saat diama ... diamankan itu kami tidak mengetahui secara persis, Yang Mulia, berapa jumlah keseluruhannya, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [36:53]

Tapi, ini 3 orang dengan ada amplop, jumlah amplopnya kita tidak tahu, ya?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [36:57]

Ya, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Tapi uangnya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:00]

Ada yang isi Rp100.000,00, ada yang isi pecahan Rp150.000,00, Yang Mulia ... Rp150.000,00, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [37:03]

Rp100.000,00, Rp150.000,00 karena tidak tahu berapa amplopnya, jadi susah mengali-ngalikan, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:07]

Ya, Yang Mulia.

249. KETUA: SALDI ISRA [37:09]

Itu ... apa dibagikan ke setiap orang di kecamatan itu?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:12]

Ya, Yang Mulia.

251. KETUA: SALDI ISRA [37:12]

Apa ... apa buktinya (...)

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:12]

A ... ada ... enggak di semua ... semua orang, Yang Mulia, ada beberapa orang, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [37:18]

Ada beberapa orang?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:19]

Ya, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

Oke, lanjut!

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:24]

35 Yang Mulia, tadi (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [37:25]

Ya ... ya.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:25]

Ya.

259. KETUA: SALDI ISRA [37:26]

Silakan!

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [37:27]

Bahwa demi tegaknya Konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024, 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember pukul 16.48 WITA dan meme ... memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju, tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

261. KETUA: SALDI ISRA [38:00]

Oke, Petitem!

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [38:03]

Berdasarkan selaru ... seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut.

1. Mengumpulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, 6 Desember 2024

yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 16.48 WITA.

Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutinah S., S.H., M.M., S.I., dan Yuki Permana, S.T., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan ... Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 tertanggal 22 Desember 2024.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Terima kasih.

Kalau didiskualifikasi pasangan calon itu berarti jadi pasangan calon tunggal di situ?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWIN [39:25]

Ya, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau didalami, Prof. Enny? Yang Mulia, silakan!

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:33]

Tadi yang money politics tadi, buktinya apa itu? Bukti P berapa? Di sini enggak Anda sebutkan 22 ... halaman 22 itu. Ada buktinya? P berapa?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [39:46]

Mohon izin, Yang Mulia, nanti kami ajukan bukti tambahan. Itu kami menemukan bahkan ada oknum anggota DPR yang membagikan langsung bersama camat kami (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:55]

Tapi di sini belum ada buktinya, ya?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [39:57]

Belum kami ajukan, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:55]

Kemudian ada laporan ke Bawaslu, enggak? Dari yang Anda dalilkan tadi sebagai sebuah faktor pelanggaran? (...)

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [40:01]

Ya, sudah ditangani Bawaslu, Yang Mulia, yang terkait, yang ditemukan beberapa orang itu, yang membagi-bagikan (...)

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:08]

Ya. Itu yang terkait dengan money politics. Yang lainnya, yang Anda katakan pelanggaran tadi, ada sudah laporan ke Bawaslu?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [40:13]

Sudah, Yang Mulia.

Namun, tadi sesuai dengan pendalilan kami, Bawaslu tidak menindaklanjuti hal tersebut, Yang Mulia. Yang berkaitan dengan TSM (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:21]

Semuanya yang dilaporkan tidak ada respons dari Bawaslu?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [40:25]

Yang terkait dengan laporan TSM kami, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:26]

Semuanya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [40:26]

Semua, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSI [40:27]

Oke, terima kasih.

279. KETUA: SALDI ISRA [40:30]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup? Cukup?

Sekarang kita lanjut ke Perkara Nomor 48, Kabupaten Tulang Bawang. Silakan!

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [40:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. (...)

281. KETUA: SALDI ISRA [40:47]

Ini supaya lebih adil juga, biar di depan ada enggak yang mau ngasih tempat teman kita ini. Kasian juga dia. Sudah tulang bawang itu kan enggak keras-keras betul. Anda ini mentang-mentang orang dari Tulang Bawang itu enggak dikasih tempat di depan. Satu orang saja, jangan berdua, nah, gitu, kalau ada di depan itu kan sorot kamera itu jauh lebih jelas.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [41:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Sudah dikasih tempat (...)

283. KETUA: SALDI ISRA [41:16]

Ya, silakan. Ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [41:17]

Assalamualaikum wr. wb.

285. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Walaikumsalam.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [41:16]

Izinkan kami membacakan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, atas nama pemohon Hendrywansyah dan Daniel Akbar ... Daniel Anwar sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor Urut 3 sebagaimana penetapan KPU dan kami anggap dibacakan.

287. KETUA: SALDI ISRA [41:53]

Oke.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya?
Tenggang Waktu? (...)

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [41:59]

Tenggang Waktu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Legal standing?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:03]

Legal standing, Yang Mulia. Kami memohon untuk penundaan ambang batas, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [42:05]

Oke, kenapa?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:07]

Karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis (...)

293. KETUA: SALDI ISRA [42:11]

Berapa selisih suaranya ini?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:14]

Selisih 42.000 suara, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [42:16]

Perbedaannya, ya?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:17]

Ya, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [42:19]

Jadi kalau begitu Anda ini mewakili pasangan Nomor 3, ya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:21]

Ya, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [42:22]

Oke. Terus?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:25]

Langsung masuk ke pokok permohonan, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [42:26]

Langsung, pokok permohonan. Mana yang TSM-nya itu?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:30]

Ya, Yang Mulia.

TSM-nya dapat kami uraikannya adanya keterlibatan pejabat bupati Kabupaten Tulang Bawang dan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor Urut 2, yaitu Drs. Qodratul Ikhwan dan Hankam Hasan.

303. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

Apa indikasinya? Buktinya apa?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:53]

Buktinya, Yang Mulia, terdapat di bukti yang sudah kami lampirkan, Yang Mulia (...)

KETUA: SALDI ISRA [42:53]

Ya.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:53]

Di antara lain adalah pidato-pidato bahwa sebelum mencalonkan diri ... pidato Qodratul Ikhwan di beberapa acara dan juga bahwa Arianto, S.,E. M.N.D.M. yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Tulang Bawang dan ditunjuk sebagai Pj sekretaris daerah Tulang Bawang merupakan adik kandung (...)

306. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [42:58]

Dari Hankam Hasan yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2004[*sic!*] dan berpasangan dengan Qodratul Ikhwan, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [43:22]

Itu yang ada pernyataannya tanggal 21 Agustus itu apa? Menunjuk melantik 21 Agustus, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:28]

Ya, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [43:29]

Terus, Agustus itu kan belum ada pemilihan?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:35]

Belum, Yang Mulia. Cuma sudah tahapan pemilihan, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [43:39]

Belum tahapannya, ya.
Terus, apa lagi?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:42]

Ya, Yang Mulia.
Kemudian, Pj sekretaris daerah itu menunjuk adik kandung dari salah satu calon, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [43:49]

Menunjuk bagaimana ini? Ditunjuk begini?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:51]

Ya, dilantik, Yang Mulia, untuk menjadi Pj sekda, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [43:54]

Oh, Pj sekda.
Terus?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:55]

Ya, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [43:58]

Apa lagi?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [43:59]

Terus ada beberapa ... terus program-program (...)

320. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Ada ndak, kegiatan real dari Pj Sekda atau Pj Bupati itu, kemudian yang jelas-jelas mengarahkan untuk memilih pasangan calon?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [44:09]

Ada, Yang Mulia, di beberapa bukti yang sudah kami lampirkan mereka (...)

322. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

Ini di poin berapa Anda jelaskan?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [44:14]

Di program Karya Bakti di Kampung Sungai Burung, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [44:17]

Bukan, makanya Anda dengar dulu! Di poin berapa Anda jelaskan di sini?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [44:21]

Poin tujuh, Yang Mulia, halaman 11.

326. KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Poin tujuh, sebentar, kita cek. Bahwa program Karya Bakti, Anda bacakan! Apa itu?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [44:31]

Ya, Yang Mulia. Bahwa program karya bakti di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, yang diinisiasi oleh Dr. Qodratul Ikhwan BY, M.M. yang anggarannya bersumber dari anggaran pemerintah daerah, yang kembali diusung dan diingatkan kembali oleh Pejabat Bupati Ir. Ferli Yuledi., M.M., M.T. setelah Dr. Qodratul Ikhwan BY, M.M. resmi ditetapkan sebagai calon bupati, menggambarkan gerakan TSM dalam menggunakan program pemerintah daerah untuk memenangkan Paslon 02 (...)

328. KETUA: SALDI ISRA [44:54]

Ini kapan ini kejadiannya, poin tujuh ini?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [44:59]

Poin tujuh ini terjadinya di bulan ju ... Juli, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [45:07]

Juli, Juli ya? Saya catat di sini. Oke, lanjut!

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [45:12]

Bahwa selain itu juga Haryanto, S.E., M.DEP, yang merupakan adik kandung dari Hankam Hasan, Calon Wakil Bupati Tulang Bawang, masuk di dalam grup WhatsApp dengan nomor WhatsApp 081377611024, yang grup tersebut diberi nama Vini Pidi Pici dan dalam grup tersebut terpasang foto pasangan Qodratul Han ... dan Hankam, yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

332. KETUA: SALDI ISRA [45:35]

Dia masuk di situ sebagai admin atau dimasukkan orang sebagai anggota? (...)

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [45:37]

Sebagai admin, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [45:39]

Sebagai admin. Siapa saja anggotanya di situ?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [45:42]

Di situ anggotanya ada, ter-screenshoot di dalam bukti kami, Yang Mulia. Ada Khoiri Nuryansyah.

336. KETUA: SALDI ISRA [45:48]

Berapa banyak anggotanya?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [45:50]

Ada, ter-screenshoot itu ada delapan.

338. KETUA: SALDI ISRA [45:52]

Oh.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [45:53]

Dan ada salah satu bernama Hendra Amco, dengan nomor 082256279199 di dalam grup situ (...)

340. KETUA: SALDI ISRA [45:59]

Ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [46:00]

Intens dalam mengkampanyekan pasangan, Yang Mulia, di Facebook dan media sosial.

342. KETUA: SALDI ISRA [46:05]

Oke. Terus, ini hebat sekali ya, sampai kena grup WA pun ditelisi begitu, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [46:14]

Ya, Yang Mulia. Alhamdulillah, Yang Mulia (...)

344. KETUA: SALDI ISRA [46:15]

Ya, Silakan, lanjut!

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [46:18]

Adanya keterlibatan aparatur sipil negara, maupun pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2004 Nomor Urut 2, Yang Mulia. Qodratul dan Hamka Hasan.

346. KETUA: SALDI ISRA [46:30]

Ya, apa bentuk keterlibatannya ini?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [46:34]

Bahwa selain ada keterlibatan Pejabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan pejabat Sekretaris Daerah kabu ... Kabupaten Tulang Bawang dalam memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 Qodratul dan Hamka Hasan, juga ada ASN, terutama yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Yang Mulia, Tulang Bawang tidak netral. Terbukti, salah satu pegawai negeri yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum bernama Ridwansyah sebagai Kepala UPTD Wilayah 5, ditetapkan oleh Bawaslu Tulang Bawang berstatus melanggar peraturan perundang-undang lainnya, netralitas ASN. Karena hadir pada saat pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Qodratul Ikhwan BY, M.M. dan Hamka Hasan, mengunjungi kegiatan pemberian bantuan (ucapan tidak terdengar jelas) atau Gorong-Gorong, di masa kampanye di daerah Rengas Cendung, lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

348. KETUA: SALDI ISRA [47:15]

Oke, apa lagi?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [47:16]

Ya, bahwa selain itu juga adanya postingan pegawai honor di Dinas Pekerjaan Umum dengan akun Facebook bernama Syahrudi dengan foto tiga orang sebelah kiri. Syahrudi di tengah, Hamsan ... di tengah, Hamka Hasan yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak yang bertuliskan, "Tegak Lurus dari Awal Sampai Menang, Menyalakan, Memenangkan Qodham".
Qodham itu singkatan mereka, Yang Mulia.

350. KETUA: SALDI ISRA [47:37]

Oke, lanjut. Ada yang (...)

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [47:39]

Bahwa di akun TikTok Syahrudi (...)

352. KETUA: SALDI ISRA [47:39]

Jangan dibacakan detail semua, poin-poinnya saja!

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [47:42]

Oh ya, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [47:43]

Adanya penggunaan alat berat pemerintah daerah itu apa tuh?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [47:46]

Oh ya, siap Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [47:47]

Ya, lanjut!

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [47:48]

Adanya penggunaan alat berat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diatasnamakan berasal dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor Urut 2, Yang Mulia. Bahwa dalam masa pemilihan calon bupati ... bupa ... Dinas pekerjaan umum, Yang Mulia, Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memenangkan salah satu pasangan, yaitu Nomor Urut 2 adanya upaya-upaya mempromosikan (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [48:11]

Ini kapan ini kejadiannya?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:12]

Masa kampanye, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [48:14]

Ya, masa kampanye itu kapan? Kan, panjang.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:19]

Ada di bukti, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [48:20]

Ya, nanti kita lihat.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:21]

Ya, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [48:22]

Bukti Anda bukti video lagi, kan?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:23]

Ya, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [48:24]

Lalu di bukti video itu nanti diceritakan kapan (...)

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:27]

Siap.

368. KETUA: SALDI ISRA [48:28]

Siapa, ada di situ semua?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:29]

Ada, Yang Mulia.

370. KETUA: SALDI ISRA [48:30]

Oke, terus, lanjut!

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:33]

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pejabat Sekretaris daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta aparatur sipil negara, honor di lingkungan (ucapan tidak terdengar jelas) merupakan tindakan yang terstruktur, Yang Mulia sebab apa? Dianggap dibacakan (...)

372. KETUA: SALDI ISRA [48:47]

Oke, terstruktur yang sudah, lanjut ke sistematis. Di halaman 21 (...)

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:51]

Sistematiknya pelanggaran yang dilakukan dengan terjadinya, dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, Yang Mulia.

374. KETUA: SALDI ISRA [48:59]

Ya.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:01]

Bahwa terjadi politik uang yang digunakan untuk yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Qodratul Ikhwan sebagai berikut, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [49:10]

Ya.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [48:10]

Bahwa politik uang secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan Kepada ketua PC Muslimat NU Tulang Bawang, sebesar Rp50.000.000,00, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [49:19]

Ini perempuan atau apa?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:21]

Untuk ketua PC Muslimat NU Tulang Bawang, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [49:24]

Dikasih ke dia saja, begitu?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:26]

Ya, sebesar Rp50.000.000,00.

382. KETUA: SALDI ISRA [49:27]

Ya.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:28]

Berita ini termuat di online, Yang Mulia, bahkan mereka pakai advokat, Yang Mulia, untuk ... karena pihak ... pihak yang diberi uang berkampanye untuk pasangan yang lain, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [49:40]

Oh.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:41]

Lalu mereka gugat.

386. KETUA: SALDI ISRA [49:42]

Ini terima uang Rp50.000.000,00 (...)

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:43]

Ya.

388. KETUA: SALDI ISRA [49:44]

Tapi kampanyenya untuk pasangan lain?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:45]

Ya, Yang Mulia. Kemudian, mereka gugat.

390. KETUA: SALDI ISRA [49:46]

Berarti ndak, ndak mangkus uang Rp50.000.000,00 itu untuk mempengaruhinya namanya (...)

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:49]

Ya, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [49:50]

Nah, ya, katanya. Lanjut!

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [49:53]

Bahwa politik uang melalui tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan dengan terstruktur, sistematis, atas dasar pengakuan para pelaku ini sudah tertangkap, Yang Mulia. Jadi, terstruktur dengan pola koordinator kecamatan.

394. KETUA: SALDI ISRA [50:04]

Oke.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:5]

Koordinator desa di seluruh Kecamatan Tulang Bawang sistematis, Yang Mulia. Seluruh uang dimasukkan kedalam amplop (...)

396. KETUA: SALDI ISRA [50:10]

Ya.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:10]

Dan dengan sistem yang rapi, seluruh pembagian uang dimasukkan amplop, dan adanya proses pendataan, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Oke.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:16]

Dan adanya perintah, baik oleh tim maupun oleh partai (...)

400. KETUA: SALDI ISRA [50:18]

Berapa banyak yang terdata dan yang dibagikan itu? Ada catatannya, enggak?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:23]

Kita mendapatkannya pas proses.

402. KETUA: SALDI ISRA [50:25]

Kami, jangan kita (...)

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:26]

Ya, Yang Mulia. Kami mendapatkannya pas proses tertangkap tangan, Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [50:30]

Yang tertangkap tangan berapa? (...)

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:31]

Kemudian, mereka melakukan pengakuan, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [50:32]

Berapa itu?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:34]

Hampir di itu terdapat 2 orang, 2 orang, 2 orang, Yang Mulia. Dengan jumlah amplop, 1 orang di bawah kordes 30, 30 amplop, Yang Mulia.

408. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Oke, isinya?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:43]

Hampir sama.

410. KETUA: SALDI ISRA [50:44]

Isinya Rp50.000,00, Rp50.000,00?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:45]

Ya, Yang Mulia.

412. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Oke.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:47]

Bahwa seluruh tangkapan ini sudah dilaporkan di Bawaslu dan sudah ditangani, Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [50:51]

Oke, pembagian bantuan sosial ... sosial lansia itu apa maksudnya?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:56]

Ya, Yang Mulia. Bahwa terdapat pembagian bantuan sosial lansia penyandang disabilitas di saat masa kampanye, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [51:03]

Ya.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:04]

Padahal itu sudah ada larangan dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia, yang dilakukan oleh Bupa ... Pj Bupati, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [51:11]

Ya, kalau Pj kan boleh, kan?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:13]

Boleh, Yang Mulia. Tapi (...)

420. KETUA: SALDI ISRA [51:14]

Ya.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:14]

Terdapat larangan, Yang Mulia, dari Mendagri.

422. KETUA: SALDI ISRA [51:16]

Bukan. Orang Pj mau menyelenggarakan program pemerintah kok dilarang? Bagaimana itu?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [50:21]

Ya, Yang Mulia.

424. KETUA: SALDI ISRA [51:22]

Yang penting dia membagikan itu tidak menyebut ini uang dari pasangan calon sekian. Ada disebut begitu?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:27]

Ada, Yang Mulia.

426. KETUA: SALDI ISRA [51:28]

Ada buktinya?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:29]

Ada saksi, saksi, Yang Mulia.

428. KETUA: SALDI ISRA [51:30]

Buktinya ada?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:31]

Bukti kita berupa saksi, Yang Mulia.

430. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Oke, terus apa lagi?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:37]

Terdapat indikasi kesengajaan keterlambatan pemberian undangan pemungutan suara oleh KPU Tulang Bawang, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [51:41]

Oke.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [51:43]

Bahwa adanya indikasi kesengajaan keterlambatan pembagian undangan dan tidak dibagikan yang undangan tersebut yang menguntungkan pasangan Paslon Nomor Urut 2 Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan, dan merugikan Pemohon karena terungkap fakta banyak undangan yang datang terlambat dan bahkan tidak terbagi di daerah basis massa Pemohon sehingga (...)

434. KETUA: SALDI ISRA [52:00]

Oke. Anda tahu enggak, kalau orang enggak ada undangan pun bisa datang ke TPS, Anda tahu, enggak? Ketentuannya?

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:06]

Bisa ... tahu, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [52:07]

Nah, oke, lanjut!

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:09]

Terdapat indikasi kertas suara telah dicoblos dengan coblosan di pasangan Nomor Urut 2, Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan, Yang Mulia.

438. KETUA: SALDI ISRA [52:15]

Berapa banyak yang tercoblos untuk 02 itu?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:18]

Yang ditemukan 2, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [52:19]

Oh, 2. Oke lanjut! Penggunaan (...)

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:24]

Penggunaan kewenangan program kegiatan menguntungkan paslon ... Paslon 02. 6 bulan sebelum penetapan paslon (...)

442. KETUA: SALDI ISRA [52:30]

Oke.

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:30]

Sampai dengan penetapan paslon, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [52:32]

Oke.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:32]

Bahwa Dr. Qodratul Ikhwan merupakan calon yang dapat disebut sebagai calon petahana, Yang Mulia, semenjak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat Bupati Tulang Bawang pada tanggal 18 Desember 2022, hingga mengundurkan diri sebagai Pejabat Bupati ... Bupati tanggal 17 Juli 2024, menjabat selama 19 bulan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Tulang Bawang Periode 2024-2029.

Bahwa tag udang manis: unggul, damai, nyaman, guyub, mandiri, agamis, natural, inovatif, dan sejahtera mulai dicanangkan oleh Qodratul Ikhwan saat menjabat 14 Maret 2023. Bahwa Qodratul Ikhwan saat menjabat Pejabat Bupati Tulang Bawang, membangun proyek di Daerah Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Ada proyek jembatan pandang tangga langit, kawasan Cakat ini, Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa terdapat lagu jingle, Yang Mulia, pasangan calon Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan di masa kampanye, maupun tidak masa kampanye, dan (...)

446. KETUA: SALDI ISRA [53:25]

Apa lagunya itu? (...)

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:26]

Ada di video Yang Mulia (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [53:28]

Bisa dinyanyikan enggak, itu?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:29]

Tapi menggunakan proyek itu, Yang Mulia.

450. KETUA: SALDI ISRA [53:32]

Oke.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:33]

Jadi, mereka ambil videonya, calon itu di proyek ... proyek itu, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [53:37]

Oh, di proyek itu, ya?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:37]

Proyek ... ya, Yang Mulia.

454. KETUA: SALDI ISRA [53:39]

Jadi, katakan ini proyek saya, ya?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:41]

Ya, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [53:42]

Oke, Terus!

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:42]

Kemudian, tagline branding udang manis di akun-akun kampanye Paslon Nomor Urut 2 dan juga tagline ini masih dipakai oleh pejabat berikutnya, Yang Mulia. Yakni Insinyur Ferli Yuledi.

458. KETUA: SALDI ISRA [53:51]

Ya.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [53:51]

Melalui sumber dari akun resmi media sosial Instagram. Media center Pemkab Kabupaten Tulang Bawang, postingan tema Pj Bupati Tulang Bawang Insinyur Ferli Yuledi, menghadiri rapat perhimpunan DPRD Tulang Bawang, 23 September 2024.

460. KETUA: SALDI ISRA [54:03]

Oke, apa lagi?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [54:04]

Penggunaan tagline ... tagline (...)

462. KETUA: SALDI ISRA [54:06]

Jangan, jangan tagline terus (...)

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [52:08]

Oh, ya, Yang Mulia (...)

464. KETUA: SALDI ISRA [54:08]

Coba yang lain lagi, ya.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [54:09]

Bahwa program karya bakti di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas. Dibuka oleh Qodratul Ikhwan dan diingatkan kembali oleh pejabat Bupati Insinyur Ferli Yuledi, setelah dia menjadi calon Bupati. Mengambarkan gerakan sistematis dan masif dalam menggunakan program pemerintah daerah untuk memenangkan paslon 0 ... 02 Qodratul Ikhwan-Hamka Hasan.

Bahwa tindakan tersebut (...)

466. KETUA: SALDI ISRA [54:28]

Lanjut.

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [54:28]

Oh, lanjut, Yang Mulia. Pas ... mas ... masif (...)

468. KETUA: SALDI ISRA [54:31]

Masif.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [54:32]

Pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas yang meliputi beberapa kecamatan, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana uraian Pemohon tersebut di atas telah terbukti bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pejabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan pejabat sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Serta aparatur sipil negara maupun pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Tulang Bawang secara terencana matang serta menggunakan strategi yang baik.

Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dilakukan dalam rangka mengkampanyekan dan memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024, yaitu Qodratul Ikhwan dan Hasan.

Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut hampir beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Banjar Margo, Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Dente Teladas, Gedung Meneng, Penawar Tama, Rawajitu Selatan. Sedangkan politik uang dan pembagian bantuan sosial lansia dan penyandang disabilitas terjadi hampir disuruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

470. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

Di Kabupaten Tulang Bawang ini berapa kecamatan?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:24]

15 Kecamatan, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [55:26]

Tapi yang ... yang terindikasi kuat ini di 7 ini, ya?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:29]

Ya, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [55:30]

Oke, kalau yang lain-lainnya enggak?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:31]

Ada, Yang Mulia (...)

476. KETUA: SALDI ISRA [55:33]

Cuma enggak (...)

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:33]

Tapi bukti kita hanya keterangan saksi, Yang Mulia.

478. KETUA: SALDI ISRA [55:36]

Oke.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:37]

Bahwa adanya temuan Bawaslu, keterlibatan kepala kampung tidak netral dan mendukung Pasangan Nomor Urut 2, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [55:42]

Oke, sudah cukup itu, ya? Ini yang Anda minta dilakukan pemungutan suara ulanglah. Gitu, ya?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:48]

Ya, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [55:49]

Diskualifikasi pasangan calon.
Lanjut Petitum!

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [55:51]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang akan ... yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti bahwa pe ... maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Satu (...)

484. KETUA: SALDI ISRA [56:03]

Ya.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [56:04]

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, pukul 00.05 WIB. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, yaitu Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat peng ... pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang, tanpa mengikutsertakan Qodratul Ikhwan dan Hamka Hasan (...)

486. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Ya.

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [56:42]

Sebagai Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2024.

Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU.

Me ... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [57:05]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau disampaikan? Silakan!

489. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [57:11]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa Pemohon ya, ini Saudara sudah mengelompokkan, mengkategorikan TSM ini sudah bagus sekali, lengkap gitu ya, dan di banyak tempat. Cuma saya tidak melihat uraian bahwa Saudara ini tindaklanjutnya seperti apa? apakah sudah ditindaklanjuti pelanggaran ini, laporan kepada penyelenggara pemilu atau pengawas, atau mungkin juga ke Bawaslu, terutama.

Ini tidak ternampak uraian itu, apalagi ini ada mengarah kepada pidana pemilu adanya penyelenggara wewenang program dan sebagainya. Nanti kalau mungkin Saudara memiliki bukti-bukti nanti (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [57:51]

Ya, Yang Mulia.

491. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [57:52]

Nanti tapi tidak nampak di dalam uraian ini.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [57:55]

Kami sudah (...)

493. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [57:57]

Sudah tindak lanjut (...)

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [57:58]

Tindak lanjuti buktinya laporan, Yang Mulia.

495. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:02]

Apa tindak lanjutnya?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:03]

Tindak lanjutnya ini kan laporan, tapi sama Bawaslunya dibuat menjadi temuan, Yang Mulia. Tanpa memanggil yang melapor.

497. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:10]

Yang lain, ini kan banyak sekali tadi (...)

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:12]

Uda ... ada, Yang Mulia. Sud ... kalau money politics (...)

499. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:13]

Ada ya, punya bukti-bukti itu, ya?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:15]

Ya, Yang Mulia.

501. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:16]

Karena ini harus di ... apa ... dipertanggungjawabkan.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:21]

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

503. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:22]

Alasan permohonan Saudara ini.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:23]

Ya, Yang Mulia.

505. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:24]

Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [58:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Yang Mulia Prof. Enny?

507. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH KUASA [58:29]

Ya, sedikit saja Itu Pj Sekdanya itu kapan dilantiknya?
Diangkatnya? Pj Sekda.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:38]

21 Agustus, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:41]

21 Agustus, ya?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:43]

Ya, Yang Mulia.

511. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:44]

Pj Sekdanya lho ya, yang Saudara sebut sebagai adik kandung
Hamka Hasan itu 21 Agustus 2024, benar?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:50]

2024, Yang Mulia.

513. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:52]

2024.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:53]

3 bulan menjelang penetapan, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:56]

Oh (...)

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [58:57]

Setelah calon mendapatkan dukungan partai, Yang Mulia.

517. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:00]

Oke.

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [59:02]

Adiknya mendapat dukungan partai, Kakaknya mendapat dukungan partai, kemudian ditunjukkan jadi (...)

519. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:06]

Ada buktinya tuh yang 21 Agustus?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [59:07]

Ada, Yang Mulia. Sudah kami lampirkan di bukti, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:10]

Sudah, sudah laporkan itu ke Bawaslu? Yang terkait dengan hal ini. Itu kan ada di Lampasa 71, S1 itu ada larangan pejabat daerah, memang tidak menyebutkan bulan di situ, dilarang, kemudian membuat kebijakan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak itu Saudara laporkan, enggak?

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [59:27]

Kami laporkan di satu rangkaian, Mulia, oleh lembaga (...)

523. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:31]

Apa kemudian tindakan dari Bawaslu?

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [60:00]

Nah itu, Yang Mulia, laporan diubah menjadi temuan, Yang Mulia. Kemudian diputuskan mereka, tidak ada (...)

525. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [60:38]

Ya. Nanti biar direspon sama Bawaslu dan kami (...)

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [60:40]

Ya, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [60:41]

Terima kasih.

528. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Terima kasih, ya. Jadi, Ini sesinya ... apa ... Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tolong dimatikan miknya!

Sebelum ditutup, kita sahkan bukti terlebih dahulu untuk Perkara Nomor 20, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12 lengkap, tambahan Bukti P-13 sampai dengan P-19, benar?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:00:17]

Betul, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:00:18]

Oke, dinyatakan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 147, Pringsewu, Lampung, Bukti P-1 sampai dengan P-6, tambahan Bukti P-7 dan P-8, betul?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [01:00:41]

Betul, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:00:41]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ini ada beberapa catatan, surat kuasa khusus dua kuasa hukum belum bertanda tangan, Arief Suherman dan Reza Setiawan. Nanti dilengkapi, kuasa hukum ada empat, tetapi yang menyerahkan KTA hanya satu, yaitu Mona Tiara Putri. KTA tersebut tidak terlihat masa berlakunya. Nanti dirapikan, ya.

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI PUTRI [01:01:08]

Siap, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:01:09]

Oke.

Perkara 207, PHPU Bupati Mamuju, Bukti P-1 sampai Bukti P-29, betul?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [01:01:20]

Betul, Yang Mulia.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:01:21]

Oke, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA atas nama Nasrun A., Irwin Deddy, Jack Z., Timbunga, Agus Purnomo, Akriadi, Abu Bakar, dan Muhammad Rizal, habis masa berlakunya 31 Desember 2024. Sudah diperbaiki, belum?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [01:01:39]

Nanti, Yang Mulia. Kami perbaiki.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:01:41]

Nanti (...)

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [01:01:42]

Siap, Yang Mulia (...)

540. KETUA: SALDI ISRA [01:01:42]

Kalau enggak, nanti enggak boleh masuk ruang sidang berikutnya.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: AKRIADI [01:01:43]

Siap, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:01:44]

Ya.

Perkara 48, Tulang Bawang, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21C, tambahan Bukti PB-1A sampai dengan PB-5, betul?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:00]

Betul, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan, Kuasa Hukum atas nama Arief Suherman, dalam surat kuasa bertanda tangan pada nama Putri Maya Rumanti.
Nanti tanda tangannya ini. Nanti dicek itu.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:13]

Ya, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]

KTA kuasa hukum belum diserahkan.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:16]

Ya, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:02:17]

Serahkan, itu.

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:18]

Ya, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:02:18]

Bukti P-55.A-1 tidak ada bukti fisiknya?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:23]

Ya, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:02:24]

Oke, nanti dilengkapi, ya!

553. KUASA HUKUM PEMOHON 48: PUTRA [01:02:25]

Ya, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:02:26]

Oke, nanti dilengkapi, ya. Ini yang bermasalah, ini tidak termasuk yang disahkan tadi. P-12, P-19A, P-19B, bukti fisik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DAB. Daftar Alat Bukti, nanti disesuaikan.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:37]

Siap, Yang Mulia (...)

556. KETUA: SALDI ISRA [01:02:37]

Ya.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:02:38]

Ya, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:02:38]

Cukup? Terima kasih, ada yang mau bertanya? Apa itu yang mau disampaikan?

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:02:47]

Dari Pihak Terkait Perkara 20, tadi memasukkan kuasa tambahan, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:02:53]

Oke (...)

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:02:54]

Sebelum persidangan (...)

562. KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Oke, urusan-urusan Anda itu nanti kita bicarakan di sidang berikutnya.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:02:57]

Baik (...)

564. KETUA: SALDI ISRA [01:02:58]

Oke (...)

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:02:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:02:59]

Kalau, ada yang mau inzage, boleh. Itu dilakukan di jam kerja di Gedung 1, mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Itu yang mau ditanyakan tadi? Apa lagi? Silakan!

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMSUL [01:03:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait Perkara 207, ingin menyampaikan bahwa permohonan yang kami dapatkan di laman MK dari Pemohon, baik itu permohonan yang perbaikan maupun permohonan yang teregistrasi hilang halaman 22-nya. Ya, Yang Mulia.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Oke.

**569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMSUL [01:03:36]**

Siap.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:03:37]

Nanti akan, sudah didengar oleh bagian Kepaniteraan, nanti dilengkapi.

**571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMSUL [01:03:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:03:41]

Halaman 22 yang hilang, ya?

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMSUL [01:03:42]**

Halaman 22, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:03:43]

Oke (...)

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:03:44]**

Ada yang kami tambahkan, ya. Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:03:45]

Ya.

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:03:45]**

Bahwa tadi di setelah dibacakan permohonan dari Pihak Pemohon kami ada keberatan menyatakan bahwa (...)

578. KETUA: SALDI ISRA [01:03:46]

Keberatan Bapak sampaikan nanti, tidak sekarang, ya.

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:03:58]**

Ya (...)

580. KETUA: SALDI ISRA [01:03:58]

Oke, ya? Anda ada ... apa ... Pihak Terkait ada sesinya, Pak. Ya?

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:04:05]**

Siap. Siap, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:04:06]

Jadi, setelah ini kan, Termohon, kemudian Pihak Terkait, Bawaslu itu ada sesinya. Keberatan, tidak setuju, segala macam, sampaikan di situ nanti.

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:04:05]**

Siap.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:04:06]

Sekarang sesinya mereka ini. Ya?

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD WAHAB [01:04:07]**

Siap. Siap, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:04:20]

Oke. Ada yang lain lagi?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA

Yang Mulia (...)

588. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:22]

Izin, Yang Mulia (...)

589. KETUA: SALDI ISRA [01:04:22]

Dari?

590. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:23]

Dari Termohon 207.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:04:24]

Apa?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:25]

Pertama menyampaikan terkait dengan permohonan juga yang kami terima itu terpotong.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]

Ya.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:30]

Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi.
Yang kedua, Surat Kuasa kami pada bagian registrasi dan konsultasi diarahkan untuk diserahkan melalui Majelis di ruang sidang.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:04:38]

Nanti setelah ini bisa diselesaikan, ya? Di (...)

596. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:39]

Baik.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:04:40]

Diserahkan.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDIN KASRUL [01:04:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:04:41]

Ada lagi yang lain?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:04:42]

Ada, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:04:44]

Dari?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:04:44]

Pemohon, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:04:44]

Oke.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:04:44]

Yang Mulia, apakah memungkinkan kami menambah bukti, Yang Mulia, susulan?

605. KETUA: SALDI ISRA [01:04:50]

Boleh. Nah, itu yang mau saya sampaikan ini.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:04:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:04:55]

Jadi, bukti, tolong sampaikan selengkap-lengkapnyanya. Jadi, kalau Anda sekarang sudah menyampaikan bukti, mau menambah lagi boleh, sampai nanti diserahkan menjelang sidang berikutnya. Termasuk juga Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Harus berpikiran, ini kesempatan untuk itu. Jadi, kalau memikir nanti setelah ada pembuktian lanjutan, jangan-jangan enggak lolos ke pembuktian lanjutan. Jadi, semua bukti itu harus dioptimalkan di fase pendahuluan ini. Oke? Cukup?

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRA [01:05:29]

Cukup, Yang Mulia.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]

Ada lagi yang lain?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:05:29]

Izin, Yang Mulia.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:05:31]

Ya.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:05:32]

Terima kasih, sebelumnya, Yang Mulia. Yang ingin saya tanyakan perihal Surat Kuasa Hukum dari Prinsipal Pemohon Perkara 147.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:05:44]

Ya.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:05:32]

Yang menyatakan Kuasa Hukum dan kuasa pendamping, saat diregristrasi pendaftaran kemarin disarankan untuk ditanyakan atau diserahkan langsung ke Majelis Hakimnya saja. Pilih, ya ... pilih baik seperti apa? Kuasa hukum atau kuasa pendamping? Untuk lebih mendapatkan keyakinan kembali, pada kemarin juga, pada saat live streaming Panel 1, Yang Mulia Hakim, Bapak Suhartoyo, juga mengatakan bahwa beracara di MK juga tidak harus advokat.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:06:21]

Ya, betul.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:06:24]

Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh Kuasa Hukum selain advokat bersidang di MK adalah dosen PNS Fakultas Hukum? Apakah ada larangannya? Karena saya di daerah saya sedang viral-viralnya dan ada upaya dari sekelompok orang untuk mengkriminalisasikan saya dengan melaporkan saya ke APH, pemberitaan demi pemberitaan yang menyudutkan saya seolah-olah saya adalah advokat. Sudah saya jelaskan bahwa kasus ... khusus beracara di MK boleh selain advokat, dengan tujuan melaksanakan Tridarma perguruan ... Perguruan Tinggi (...)

617. KETUA: SALDI ISRA [01:07:05]

Cukup? Cukup, ya?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:07:05]

Ya.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:07:07]

Jawabnya sederhana, untuk beracara di Mahkamah Konstitusi tidak hanya advokat. Bukan advokat pun boleh. Yang lainnya saya tidak akan jawab. Oke. Cukup?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SATRIA PRAYOGA [01:07:16]

Cukup, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:07:17]

Cukup. Pak Totok, ada yang mau disampaikan? Karena sudah mulai ngantuk-ngantuk saya lihat, terpaksa saya sebut nama beliau itu.

Oke, dengan demikian, sidang untuk Perkara 20, 147, 207, 48 PHPU Bupati, tahun 2025 untuk agenda pendahuluan, dinyatakan ... apa ... selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.04 WIB

Jakarta, 9 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

